





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



EM15T

Ketua DPRD Kab. Sidoarjo, H Usman

## Bupati Tersangka, Ketua DPRD Sidoarjo Pastikan Pemerintahan Normal

**SIDOARJO (BM)** - Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman memastikan roda pemerintahan berjalan normal pascapenetapan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD oleh KPK

"Saya pastikan pemerintahan tetap jalan tidak akan berhenti setelah ditetapkannya bupati sebagai tersangka. Karena masih ada wakil

bupati walaupun beliau saat ini menjalankan umroh di Tanah Suci Makkah dan Madinah," ucapnya Kamis (18/4).

Politisi PKB itu menjelaskan, tugas kepala daerah atau bupati dan wakil bupati sudah dibagikan kepada semuanya organisasi perangkat daerah (OPD).

"Semua tugas mulai pelayanan dan lainnya, semita sudah di jalankan masing-masing OPD. Dan semua OPD menjalankan tugas dan

fungsinya secara normal atau seperti biasa," tambahnya.

Disinggung soal pemanggilan bupati oleh KPK hari ini, H. Usman menyatakan itu kewenangan dari KPK dan berharap yang terbaik untuk Sidoarjo.

"Kami berharap bupati masih menjalankan tugasnya secara baik. Jika memang sempat ada penahanan, otomatis roda pemerintahan akan dijalankan oleh wakil bupati," imbuhnya. (ndd)

# Pengacara Gus Muhdlor Siapkan Upaya Hukum

**SIDOARJO (BM)** -Pengacara H Ahmad Muhdlor Ali yakni Mustofa Abidin saat ini menyiapkan upaya hukum usai kliennya ditetapkan tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).

"Terkait hal tersebut, sebagai warga negara beliau (Muhdlor) hormati keputusan KPK dan menjalani proses keputusan KPK tersebut. Dalam waktu dekat akan lakukan upaya hukum, tim upaya hukum semestinya belum bisa putus karena melihat karakteristik perkara ini," katanya, Rabu.

Ia mengatakan, pada 25 Januari sudah ada operasi tangkap tangan KPK di Sidoarjo yakni di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo dan telah menetapkan tersangka Siska Wati serta Ari Suryono.

"Sebenarnya beberapa hari lalu kami sudah mendapatkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPPD) sampai beberapa saat belum ada rilis KPK," ujarnya.

Ia mengatakan, terkait dengan OTT KPK pada 25 Januari lalu merilis jikarung bukti yang disita dalam kasus tersebut sekitar Rp69 juta dan nilai tersebut dinilai terlalu kecil kalau melihat perkara ini ditangani oleh KPK. "BB kecil dan juga timing waktu OTT sebelum pilpres dan juga pilkada. Namun, kami tidak mau mengandaikan ada politisasi," ucapnya.

KPK pada Selasa (16/4) mengu-

mumkan telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"KPK belum dapat menyampaikan spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, peran dan sangkaan pasalnya hingga nanti ketika kecukupan alat bukti selesai dipenuhi semua oleh tim penyidik. Namun kami mengonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati periode 2021-sekarang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/4).

Ali menerangkan penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya.

Tim penyidik KPK kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Dengan temuan tersebut, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah

uang," ujarnya.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

KPK selanjutnya pada Jumat, 23 Februari 2024 menahan dan menetapkan status tersangka terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono (AS) dalam perkara yang sama.

Konstruksi perkara tersebut diduga berawal saat BPPD Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai target pendapatan pajak pada tahun 2023.

Atas capaian target tersebut, Bupati Sidoarjo kemudian menerbitkan Surat Keputusan untuk pemberian insentif kepada pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo

Atas dasar keputusan tersebut, AS kemudian memerintahkan SW untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan bupati. Besaran potongan yaitu 10 persen sampai 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

AS juga memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Tersangka AS juga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati.

Khusus pada 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. Penyidik KPK saat ini juga masih mendalami aliran dana terkait perkara dugaan korupsi tersebut. **(udi)**



Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor)

BM/ST

## Antisipasi Lonjakan Urbanisasi, Persyaratan Surat Pindah Masuk Diperketat

KOTA-Sidoarjo menjadi salah satu tujuan utama urbanisasi masyarakat dari berbagai daerah, terutama pasca Lebaran. Fenomena itu diprediksi akan membawa dampak sosial dan ekonomi.

Hal itu lah yang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk mengambil langkah antisipasi. Meskipun Pemkab Sidoarjo tidak melarang masyarakat mencari nafkah di wilayahnya, namun tingginya angka urbanisasi dikhawatirkan dapat memicu berbagai masalah baru.

Seperti tingginya angka kriminalitas, meningkatnya pengangguran, dan memperburuk kondisi warga miskin dan gelandangan di Sidoarjo.

Menanggapi hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo memperketat



RAMAI: Pendetang baru yang masuk ke Sidoarjo lewat Terminal Purabaya.

proses surat pindah masuk bagi pendatang baru.

"Kami ingin memastikan bahwa mereka memiliki tujuan yang jelas dan tidak membebani masyarakat setempat," ujar Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma.

Untuk mendapatkan surat pindah masuk ke Sidoarjo, pendatang baru kini harus memenuhi beberapa syarat yang lebih ketat. Yakni memiliki rumah sendiri di Sidoarjo.

Jika tinggal di rumah kontrakan atau kos, harus mendapatkan persetujuan bermaterai dari pemilik rumah. Reddy menyebut, kebijakan itu diharapkan dapat membantu mengendalikan urbanisasi ke Sidoarjo.

"Serta memastikan bahwa pendatang baru dapat

• Ke Halaman 10



### Antisipasi Lonjakan Urbanisasi,...

berkontribusi positif bagi pembangunan daerah," imbuhnya.

Urbanisasi dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi daerah tujuan. Di satu sisi, urbanisasi

dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, urbanisasi juga dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti kemacetan, polusi, dan kriminalitas.

Oleh karena itu, penting bagi Pemkab Sidoarjo untuk mengambil langkah strategis dalam mengelola urbanisasi agar dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat Sidoarjo. (nis/vga)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



## ■ PENDIDIKAN

# PPDB SMP Jalur KKO dan KKSB Sudah Dibuka

KOTA-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sidoarjo tahun ajaran 2024/2025 sudah dibuka. Para orangtua dan calon peserta didik sudah melakukan sejumlah persiapan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, ada beberapa jalur pendaftaran PPDB pada tahun ajaran ini.

Yakni jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, prestasi, Kelas Khusus Olahraga (KKO), Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI), dan Kelas Khusus Seni Budaya (KKSB).

"Saat ini jalur kelas khusus olahraga (KKO) dan seni budaya (KKSB) mulai dibuka," katanya.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo  
Alur dan jadwal PPDB jalur KKO dan KKSB dilaksanakan bersamaan. Pen-

KKSD dilaksanakan bersamaan. Pendaftaran dimulai pada 17 hingga 19 April 2024. Proses verifikasi dan validasi data dilaksanakan 18 hingga 20 April. "Hasil verifikasi dan validasi data bakal diumumkan pada 22 April," ujarnya.

Dilanjutkan dengan seleksi teknis pada 23 hingga 25 April. Hasilnya diumumkan pada 29 April 2024.

● **Ke Halaman 10**



### PPDB SMP Jalur KKO...

Peserta yang lolos diwajibkan mendaftar ulang pada 30 April hingga 2 Mei. Tirto mengimbau bagi para calon

siswa yang tertarik untuk mengikuti jalur khusus tersebut memastikan untuk memperhatikan setiap tahapan dengan cermat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk jalur lainnya, akan dilaksanakan bertahap sesuai jadwal. Setelah KKO dan KKSB, PPDB jalur Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI) bakal dibuka pada 6 Mei mendatang. (nis/vga)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Samsat Tetap Optimal Usai Libur Lebaran

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Petugas Kepolisian Resor Kota Sidoarjo memastikan pelayanan di dua Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang ada di kota setempat berjalan dengan optimal usai libur panjang Lebaran 2024.

Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Christian Tobing di Sidoarjo, Kamis, mengecek secara langsung pelayanan masyarakat di Samsat yang berada di Sidoarjo Kota dan Krian.

“Pengecekan ini untuk memastikan pelayanan di Samsat usai libur Hari Raya kembali berjalan optimal sehingga masyarakat bisa mengurus keperluan mereka tanpa adanya kendala yang berarti,” ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah ruang pelayanan masyarakat yang ada di kedua wilayah Samsat di datangi untuk melihat langsung proses pelayanan di masyarakat. “Kami juga memberikan arahan kepada petugas yang ada supaya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia mengatakan, arahan yang disampaikannya kepada petugas di Samsat agar tetap semangat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

*Terutama, lanjut dia, usai menjalani masa cuti libur lebaran serta menekankan kepada anggota kepolisian yang berdinasi di Samsat agar jangan sampai melakukan pelanggaran.*

“Pengecekan yang kami lakukan di Samsat Sidoarjo Kota dan Krian ini, guna memastikan pelayanan masyarakat kembali berjalan optimal usai libur lebaran. Anggota juga kami berikan arahan supaya pelayanan prima terus ditingkatkan begitu pula dengan kedisiplinan dalam berdinasi,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya pemantauan langsung tersebut bisa melihat dari dekat permasalahan yang harus diselesaikan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sampai dengan saat ini masih belum ada kendala yang berarti serta pelayanan di masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan nyaman.” ucapnya. (cat/rus)



Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing saat meninjau pelayanan samsat di kabupaten setempat,



# Hasil Skrining Dinkes, 190 Anak-Anak Derita TB

**SIDOARJO** - Tahun ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo mengencarkan skrining penyakit tuberkulosis atau TB. Hasilnya, 1.230 orang terdeteksi menderita penyakit yang membutuhkan pengobatan secara konsisten tersebut. Sebanyak 190 di antaranya adalah anak-anak berusia nol hingga 9 tahun.



Dengan adanya ini, kami bisa ada upaya dalam pencegahan agar tidak menular ke sekitar pengidap."

**YANTO LIMPU**  
Subkoordinator P2PM  
Dinkes Sidoarjo

Angka tersebut didapat dari penelusuran mulai Januari hingga Maret. "Dari sini, kami bisa tahu tindakan apa yang dilakukan," kata Subkoordinator P2PM Dinkes Sidoarjo Yanto Limpu kemarin (18/4).

Belajar dari kejadian Covid-19 beberapa tahun lalu, masifnya skrining dan orang yang terjangkit nanti memudahkan dalam pengendalian penyakit. "Dengan adanya ini, kami bisa ada upaya dalam pencegahan agar tidak menular ke sekitar pengidap," jelasnya. Sehingga nanti orang yang kontak erat dan berpotensi tertular diberi terapi pencegahan tuberkulosis. "Terapi tersebut bisa

dilakukan di puskesmas atau faskes lain," tuturnya.

Tahun lalu diketahui jumlah warga yang terjangkit TB mencapai 6.140 orang. Jumlah tersebut ingin ditekan pada tahun ini. Terlebih di tiap tahun sejak 2021 hingga 2023, angka pengidap TB di Sidoarjo makin meningkat.

Plt Kadinkes Sidoarjo Abdillah Segaf Alhadad menyatakan, untuk menunjang pemberantasan TB tersebut, nanti skrining rutin dilaksanakan di beberapa tempat. Dalam bulan ini, akan ada dua tempat yang didatangi Dinkes Sidoarjo. Yakni, Kecamatan Jabon pada 24 April dan Kecamatan Candi pada 25 April. (eza/c12/any)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



RUWET: Perempatan Gedangan yang selalu menjadi langganan macet dan rawan pelanggaran lalu lintas kemarin (18/4).

DITE SURENDRA, JAWA POS

## Condong Bangun Flyover Empat Lajur Dua Arah

### Mulai Review Detail Engineering Design

SIDOARJO - Pembahasan rencana pembangunan *flyover* Gedangan terus berlangsung. Saat ini masuk proses *review detail engineering design* (DED).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, kajian awal



Idealnya yang empat lajur, tapi kami masih komunikasi terus dengan pemerintah pusat."

**DWI EKO SAPTONO**

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo

terkait pembangunan *flyover* Gedangan sudah dilakukan. Lebar jalan, kebutuhan anggaran pembangunan, hingga volume kendaraan

yang melintas di jam-jam tertentu sudah diketahui.

Kajian awal volume kendaraan yang melintas tersebut jadi pertimbangan. "Saat ini masih proses *review* DED terkait *flyover* Gedangan," kata Dwi.

Sebelumnya, ada tiga opsi untuk mengatasi kemacetan di perempatan Gedangan. Yakni, pembangunan *underpass* Gedangan, *flyover* dua lajur dua arah, dan *flyover* empat lajur dua arah. Pemkab condong *flyover* empat lajur dua arah. Lebih

ideal. Sebab, jika hanya dua lajur, masih ada potensi kemacetan. Empat jalur bisa lebih lancar.

Untuk membangun *flyover* empat lajur, dibutuhkan lahan 7.044 meter yang dibebaskan di area perempatan Gedangan tersebut. "Idealnya yang empat lajur, tapi kami masih komunikasi terus dengan pemerintah pusat," katanya. Sebab, *flyover* Gedangan diusulkan untuk dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (uzi/c19/any)

## Jawa Pos

### Jaring 90 PPK dan 1.038 PPS Pilkada 2024

SIDOARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menyiapkan proses rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo 2024. Pendaftaran PPK dibuka 23 April mendatang.

Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengatakan, sesuai jadwal yang sudah disampaikan oleh KPU Pusat, pendaftaran PPK dimulai Selasa

(23/4) hingga 29 April mendatang. Masyarakat yang ingin mendaftar bisa langsung ke kantor KPU Sidoarjo. "Proses pendaftaran hanya berlangsung selama tujuh hari," ujarnya.

Iskak menyebutkan, kebutuhan PPK di Sidoarjo sebanyak 90 orang. "Tiap kecamatan butuh tiga PPK. Di Sidoarjo ada 18 Kecamatan. Jadi, total ada 90 yang direkrut," ungkapnya.

Jika pendaftar masih kurang, ada perpanjangan masa pendaftaran. "Masa perpanjangan mulai 30 April sampai 5 Mei," jelasnya.

Perpanjangan hanya tiga hari. Setelah itu, para pendaftar akan diverifikasi dan dites. PPK terpilih bakal ditetapkan 15 Mei mendatang. Selain PPK, pihaknya akan merekrut panitia pemungutan suara (PPS). Proses pendaftaran dilakukan

setelah pendaftaran PPK. Yakni, dimulai 2 Mei sampai 8 Mei mendatang.

Jika pendaftar kurang, juga akan diperpanjang selama tiga hari. Iskak mengatakan, kebutuhan PPS di tiap desa/kelurahan adalah tiga petugas. "Jadi, total butuh tiga dikali 346. Butuh 1.038 petugas," katanya. PPS terpilih bakal ditetapkan 25 Mei mendatang. (uzi/c17/any)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Pejabat Pemkab Sidoarjo Kebingungan setelah Muncul Surat Pembatalan Mutasi dan Pelaksanaan Pembatalan Mutasi

Editor: Fathur Roziq

18 Apr 2024 22:50

Headline



Pelantikan pejabat Pemkab Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa pada Jumat 22 Maret 2024. Pelantikan tersebut akhirnya dibatalkan karena tanpa persetujuan tertulis dari Kemdagri. (Foto: Dinas Kominfo Sidoarjo)



**KETIK, SIDOARJO** – Polemik soal mutasi ASN Pemkab Sidoarjo mengundang keprihatinan Komisi A DPRD Sidoarjo. Komisi bidang hukum dan pemerintahan itu mendapatkan banyak keluhan dari ASN Pemkab Sidoarjo. Mereka adalah pejabat-pejabat yang dilantik pada 22 Maret 2024 lalu, tapi pelantikannya dibatalkan. Sekarang muncul surat lagi tentang pelaksanaan pembatalan pelantikan.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H Dhamroni Chudlori MSi menyatakan dirinya menerima berbagai keluhan dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Sidoarjo. Baik pejabat eselon II maupun pejabat-pejabat eselon di bawahnya. Mereka resah.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

"Mereka bilang khawatir. Sebab, tindakan dan langkah-langkah sebagai pejabat harus bisa dipertanggungjawabkan secara aturan," ungkap Dhamroni pada Kamis malam (18/4/2024).

Mengapa? Pejabat kepala OPD, pejabat administratif, lebih-lebih bagian keuangan perlu dasar yang kuat saat menandatangani surat-surat atau dokumen kedinasan. Misalnya, tanda tangan kontrak, pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya. Jika dasar SK pelantikan meragukan, dikhawatirkan ada masalah di kemudian hari.



“Kalau ada pemeriksaan BPK dan ternyata ada masalah bagaimana,” tegas legislator asal PKB tersebut.

Saat ini, para pejabat yang dimutasi pada 22 Maret lalu sudah pindah ke organisasi perangkat daerah (OPD) baru. Di sana mereka juga harus berurusan dengan kebijakan di tempat baru. Termasuk, menandatangani surat-surat dan pertanggungjawaban keuangan.

Di sisi lain, ada surat dari sekretaris daerah tentang pembatalan SK bupati tentang mutasi pejabat pada 22 Maret itu. Surat itu bertanggal 16 April 2024. Pembatalan pengangkatan dalam jabatan berlaku sejak tanggal 19 April 2024 mendatang.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Namun, pada 18 April muncul lagi surat yang hampir serupa. Yaitu, surat tentang pelaksanaan pembatalan pengangkatan dalam jabatan. Surat itu menyebutkan bahwa pembatalan pengangkatan dalam jabatan itu berlaku pada 30 April 2024 mendatang.



"Ini menimbulkan kebingungan di kalangan ASN," tegas Dhamroni.

### **Baca Juga:**

**Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Tidak Nongol di Halalbihalal Kepala Daerah se-Jatim**

Lebih-lebih ada pula pernyataan bahwa pejabat yang dilakukan pembatalan sebagaimana SK Bupati dimaksud, kembali melaksanakan tugas pada jabatan sebelumnya berdasar surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) tertanggal 30 April.

Para pejabat ASN galau. Sebab, dua surat itu, baik pembatalan pada 16 April maupun surat pelaksanaan pembatalan tertanggal 18 April,





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Para pejabat ASN galau. Sebab, dua surat itu, baik pembatalan pada 16 April maupun surat pelaksanaan pembatalan tertanggal 18 April, menimbulkan ketidakjelasan posisi mereka saat ini. Apakah mereka ini menjabat di posisi sebelumnya atau di posisi jabatan hasil mutasi 22 Maret.



"Kalau terjadi mal-administrasi *kan* bisa berisiko. Itu keluhan para ASN," ujarnya.

Dia mencontohkan pejabat salah satu dinas yang kena mutasi. Pejabat itu mengaku terus ditanya oleh anak buahnya di OPD yang lama.

Bagaimana mengartikan surat perintah melaksanakan tugas (SPMT).

"Padahal saya *kan* sudah pindah OPD," kata Dhamroni menirukan keluhan pejabat itu.

Dhamroni menyatakan Komisi A DPRD Sidoarjo sudah menjadwalkan pemanggilan para pejabat Pemkab Sidoarjo pada Senin (22/4/2024).

Tujuannya adalah meminta penjelasan dan menjawab keraguan para pejabat itu. Agar ASN bisa melaksanakan tugas dengan tenang.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Yang direncanakan datang, antara lain, Pj Sekda sebelumnya atau Sekda yang pelantikannya dibatalkan. Juga, kepala BKD, baik kepala BKD sebelum pembatalan maupun setelah pembatalan. Ada pula bagian organisasi, bagian hukum, dan sebagainya. Termasuk, pihak-pihak lain yang terkait dengan mutasi ini.

"Tadi saya ditanya soal itu. Saya bilang Senin dipanggil. Tapi. mereka malah minta pemanggilan itu dilaksanakan besok saja (Jumat, 19 April 2024. Jangan menunggu Senin," ujarnya.



## **Sekda Dr Fenny Apridawati Keluarkan Dua Surat**

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo Dr Fenny Apridawati mengeluarkan surat baru terkait pembatalan pelantikan ratusan pejabat yang dilakukan pada 22 Maret lalu.

Surat pembatalan tersebut awalnya berlaku pada 19 April. Sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 821.2/815/438.1.1/2024 tentang pembatalan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Namun, pada Kamis (18/4/2024) Dr Fenny Apridawati mengeluarkan surat baru tentang masa berlaku pembatalan pelantikan ASN. Dari yang sebelumnya berlaku pada 19 April menjadi sampai 30 April 2024.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa setelah 30 April 2024, para pejabat yang dilantik pada 22 Maret kembali kepada jabatan lamanya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Sebelumnya, kepada wartawan, Sekda Apridawati mengatakan Pemkab Sidoarjo masih berusaha mendapatkan izin tertulis dari Kemendagri terkait mutasi jabatan pada 22 Maret itu. Dia juga meminta para pejabat yang baru dilantik itu supaya tetap bekerja

"Kami minta tetap bekerja sebagaimana mestinya," ujar Dr Fenny kepada wartawan. (\*)

